



PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI
TAHUN 2001 NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI
NOMOR : 9 TAHUN 2001

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN
BATANGHARI TAHUN 2001 – 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANGHARI

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Batanghari tahun 2001 – 2005 merupakan penjabaran dari Program Pembangunan Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2001 – 2005 yang menggambarkan visi, misi, tujuan, program dan kegiatan daerah;
- b. bahwa Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pasal 4 ayat (3) menyatakan Rencana Strategis (Renstra) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten.....

Kabupaten Batanghari Tahun 2001 – 2005.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembangunan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGI
(RENSTRA) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2001 –
2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batanghari
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batanghari
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batanghari
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batanghari
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari.
6. Rencana Strategis (Renstra) adalah Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Batanghari Tahun 2001 – 2005.

BAB II.....

BAB II

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Pasal 2

Rencana Strategis (Renstra) disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan daerah.

Pasal 3

Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Batanghari di susun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II LINGKUNGAN STRATEGIS
- BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB IV STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM
- BAB V PENUTUP

Pasal 4

- (1) Isi beserta uraian dan rincian Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Naskah Rencana Strategis (Rentra) Kabupaten Batang Hari sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III.....

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Rencana Strategis (renstra) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini akan ditinjau dan diadakan perubahan untuk di sesuaikan dengan perkembangan serta kondisi daerah dalam setiap lima tahun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batnghari.

Disahkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 4 April 2001
BUPATI BATANGHARI

dto

ABDUL FATTAH

Diundangkan di : Muara Bulian.
Pada tanggal : 4 April 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANGHARI

dto

SYAFRUDDIN EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI 2001 NOMOR 9

Pasal 7

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N B A T A N G H A R I
N O M O R 9 T A H U N 2 0 0 1

T E N T A N G

R E N C A N A S T R A T E G I S (R E N S T R A)
K A B U P A T E N B A T A N G H A R I T A H U N 2 0 0 1 - 2 0 0 5

I. P E N J E L A S A N U M U M

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan manajemen nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

kepentingan

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai setiap strategi yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup jelas
- Pasal 2 Cukup jelas
- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5 Cukup jelas*
- Pasal 6 Cukup jelas.

Lampiran

Lampiran : Peraturan Daerah
Kabupaten Batanghari
Nomor : 9 Tahun 2001

T E N T A N G
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2001 - 2005

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan paradigma telah memberikan kesempatan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 membawa implikasi meningkatnya kewenangan dan peranan daerah kabupaten/kota. Sebagian besar kewenangan yang bersifat operasional dan berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat telah menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota sesuai dengan titik berat pelaksanaan otonomi daerah.

Pemberian kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menuntut adanya aparatur pemerintahan yang bersih dan menempatkan diri sebagai orang yang harus melayani kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan pelaksanaan kewenangan dimaksud, maka pemerintahan daerah diharapkan menyusun struktur daerah, menerapkan prinsip transparansi dalam pelayanan, akuntabel dalam pelaksanaan pekerjaan, jujur dan responsif atas tuntutan masyarakat. Hal ini tentu perlu didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional dan bersih, sehingga dapat mewujudkan kinerja pemerintahan dan kelembagaan daerah yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Sebagai.....

Sebagai konsekuensi logis dari perubahan paradigma pemerintahan adalah terjadinya perubahan kelembagaan kabupaten yang harus dilakukan melalui penataan sesuai dengan tuntutan perubahan tersebut. Bagi daerah Kabupaten Batang Hari penataan kelembagaan ini menjadi sangat penting karena peranannya sangat besar dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka diperlukan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, dan keinginan ini telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten yang dituangkan dalam bentuk perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah. Perencanaan tersebut sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada perlu dirumuskan oleh kelompok kerja (Pokja) penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra)/Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten yang disusun dalam bentuk "PERENCANAAN STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI". Adapun Perencanaan strategis tersebut disusun berdasarkan kepada kondisi dan potensi daerah, permasalahan yang dihadapi dan karakteristik daerah serta lingkungan strategis.

Untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintahan dan kelembagaan daerah dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, ditengah perkembangan globalisasi yang ditandai dengan persaingan yang semakin tinggi, maka dalam Perencanaan Strategis tersebut akan diuraikan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Hal ini akan dijadikan dasar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten yang akan disampaikan setiap tahun dan pada akhir masa jabatan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pencerminan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

B. Maksud

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Perencanaan Strategis Pemerintahan Kabupaten Batang Hari tahun 2001-2005 adalah memberi arah dan pedoman bagi terciptanya keterpaduan, kebersamaan dan tanggungjawab instansi pemerintah kabupaten, sekaligus untuk dapat memberikan dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreativitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Batang Hari adalah :

- a. Membangun sistem akuntabilitas dan kinerja pemerintah kabupaten sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Batanghari.
- b. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh unit kerja, perangkat pemerintah kabupaten dan kepada seluruh unsur-unsur masyarakat Batanghari.
- c. Menjadi acuan utama dalam penyusunan perencanaan strategis unit kerja, dinas dan perangkat pemerintah kabupaten.
- d. Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten sebagai akumulatif dari kinerja unit kerja dan perangkat di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari.

C. Landasan Formil & Material

Penyusunan Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Batanghari tahun 2001-2005 berlandaskan kepada :

1. Landasan Formil :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- c. Undang.....

- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
- l. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah

2. Landasan Materil

- a. Masukan, saran, pendapat, inspirasi dan aspirasi unit kerja dan perangkat daerah Kabupaten Batanghari sebagai hasil konsultasi perumusan VISI dan MISI.
- b. Identifikasi perumusan Perencanaan Strategis Kabupaten Batanghari tahun 2001-2005 oleh Kelompok Kerja Penyusunan Perencana Strategis Kabupaten Batanghari, sebagai Tim Terpadu antara unit kerja, dinas dan perangkat daerah dengan Satuan Tugas Asistensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP Perwakilan Jambi.

D. Sistematika.....

D. Sistematika Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis disusun secara sistematis yang terdiri dari :

1. Visi, yaitu suatu gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dan akan dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Visi mengandung pengertian yang dapat dibayangkan dan memungkinkan untuk dicapai.
2. Misi, merupakan pernyataan yang mengarahkan tujuan sesuai dengan visi yang sudah dirumuskan.
3. Tujuan, adalah penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.
4. Sasaran, adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diungkapkan secara terukur baik kualitatif maupun kuantitatif.
5. Kebijakan, adalah ketentuan dan cara-cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.
6. Program, merupakan kumpulan kegiatan dengan tujuan yang sama berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.
7. Kegiatan, adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai program yang telah ditetapkan.

E. Alur Pikir

Perencanaan Strategis Kabupaten Batanghari disusun berdasarkan kebijakan nasional yang menekankan kepada penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, menjaga persatuan dan kesatuan, supremasi hukum, pemerintahan yang bersih, pemulihan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan ketahanan budaya serta mendorong pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah.

Disamping itu, Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten disusun dengan memperhatikan Pola Dasar Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari yang lebih memprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengembangan Kota Kuala Tungkal sebagai pintu gerbang Propinsi Jambi.

BAB II.....

BAB II

LINGKUNGAN STRATEGIS

A. Kondisi Umum Daerah

1. Geografis

Kabupaten Batanghari terletak di bagian Timur Propinsi Jambi dengan luas Wilayah 5.180,35 Km² dan berada diantara 1° 15' Lintang Selatan sampai dengan 2° 2' Lintang Selatan dan diantara 102° 30' Bujur Timur sampai dengan 104° 30' Bujur Timur, dengan batas wilayah sbb :

- Sebelah Timur dengan Kabupaten Muaro Jambi.
- Sebelah Utara dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tebo.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Tebo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Musi Banyu Asin Propinsi Sumatera Selatan.

Dilihat dari aspek geografis, Kabupaten ini mempunyai letak yang strategis karena merupakan lalu lintas yang menghubungkan kawasan timur dengan kawasan Barat Sumatera dan merupakan kawasan penyangga Kota Jambi.

2. Tofografi dan Iklim

Kabupaten Batanghari mempunyai ketinggian wilayah 11 – 500 M dpl, sebagian besar (97,67 %) mempunyai ketinggian 11 – 100 M dpl dan sisanya (7,33 %) mempunyai ketinggian 101 – 500 M dpl.

Secara umum beriklim tropis dengan curah hujan hampir merata sepanjang tahun (tahun 1999 rata-rata curah hujan 266 mm

dan.....

dan tahun 2000 rata-rata curah hujan 199 mm) dan variasi temperatur antara musim hujan dan musim kemarau relatif kecil rata-rata 26,2 ° C tahun 2000.

3. Administrasi Daerah dan Demografi

Sebagai wilayah Administrasi Kabupaten Batanghari terdiri dari 6 Kecamatan 104 Kelurahan/Desa dengan berbagai perbedaan perkembangan, baik karena potensi geografis, sumber daya alam, sumber daya Manusia maupun karena pembangunan prasarana pada masing-masing kecamatan dan antar Kecamatan.

Kabupaten ini pada akhir tahun 2000 mempunyai jumlah penduduk 191.727 Jiwa. Dilihat dari struktur umur, sekitar 60,19 persen adalah penduduk usia produktif dan sisanya (39,81%) kaum lanjut usia, dan anak-anak yang memerlukan sentuhan investasi untuk menjadikan mereka generasi yang berkualitas di masa depan. Penduduk di daerah ini terdiri dari berbagai suku seperti : Melayu, Jawa, Sunda, Batak, Minang, Cina, dan suku-suku lain yang jumlahnya relatif kecil.

4. Potensi sumberdaya alam

Sumberdaya alam kabupaten ini cukup potensial, diantaranya memiliki hutan tropika Humida yang kaya akan sumber plasma Nutfa dan lahan potensial untuk dikelola sebagai pengembangan budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan potensi perairan umum untuk pengembangan budidaya perikanan air tawar serta potensi pertambangan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Perkebunan sebagai potensi ekonomi terutama kabupaten ini memberi kontribusi sebesar 12,46 persen terhadap pembentukan PDRB tahun 1999. Komoditi utama di subsektor ini meliputi karet dan kelapa sawit dengan luas areal perkebunan dengan mencapai 38.916 Ha dengan produksi 234.916 Ton. Kebun kelapa sawit mendominasi produksi sektor ini yang mencapai 98,92 persen dari total produksi

dan

dan sisanya sebesar 1,082 persen adalah produksi karet dan hasil perkebunan lainnya.

Karet sebagai tanaman utama sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat di Kabupaten ini namun kondisinya kurang menguntungkan, selain cenderung menjadi hutan karet, produktifitasnya rendah ± 700 kg/ha/tahun disertai pula mutu olahan karet rakyat yang rendah sehingga membutuhkan peremajaan lebih lanjut. Sementara perkebunan kelapa sawit menunjukkan perkembangan yang cepat dan mengarah pada komoditas perkebunan utama. Peningkatan produktifitas kelapa sawit secara ekonomis mendukung pengembangan industri pengolahan lanjutan CPO dan barang ikutan lainnya menjadi barang jadi.

Kehutanan sebagai bidang kewenangan daerah hingga tahun 1999 jumlah produksinya mencapai 98.264 M³ dan mampu memberi kontribusi sebesar 5,76 % terhadap pembentukan PDRB. Namun demikian sumbangannya terhadap pendapatan daerah belum memenuhi harapan. Kondisi ini merupakan akibat kebijakan pengelolaan kawasan yang selama ini lebih berorientasi pada produksi dan bukan didasarkan pada daya dukung produksi hutan, selain tingginya intensitas perambahan dan pencurian kayu akibat perkembangan industri kayu yang kurang terkontrol, juga sering di sertai konflik yang berkepanjangan tentang penetapan kawasan hutan, baik antar sektor, antar Pemerintah maupun antara pihak swasta dan masyarakat.

Di bidang industri terlihat kecenderungan pergeseran struktur perekonomian daerah dengan kontribusi sebesar 21,78 persen. Hal ini sebagai dampak dari perkembangan industri pengolahan kayu, karet dan minyak kelapa sawit, industri kecil dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.565 jiwa, aneka industri sebanyak 19 perusahaan dengan tenaga kerja 1.507 jiwa. Jumlah investasi ketiga jenis industri tersebut mencapai 84,315 Milyar rupiah.

Masalah.....

Masalah yang dihadapi oleh industri kecil dan menengah masih berkisar pada rendahnya SDM, sehingga kemampuan memanfaatkan teknologi juga rendah, lemahnya struktur permodalan dan promosi pemasaran yang belum optimal. Sedangkan kelompok industri besar di kendalai oleh keterbatasan bahan baku.

Dalam rangka meningkatkan percepatan pergerakan arus barang dan jasa, baik di tingkat lokal maupun antar wilayah telah bila dilakukan berbagai pembangunan prasarana transportasi darat dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar 27,52 persen pada Tahun Anggaran 1999-2000 dan meningkat menjadi 30,02 persen pada tahun anggaran 2000.

Dibidang Pertanian dan Tanaman pangan dan Holtikultura cukup prospektif, hal ini di tandai kondisi awal di mana luas lahan yang diusahakan oleh petani pada akhir tahun 1999 mencapai 15.852 Ha dengan produksi 48.201 Ton. Pemasaran beberapa komoditas seperti sayur mayur dan kacang-kacangan telah memasuki pasar regional.

Peternakan merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten ini dengan populasi ternak besar mencapai 21.635 ekor, ternak kecil 24.181 ekor dan ternak unggas sekitar 769.365 ekor. Bila dibandingkan dengan kondisi 5 tahun terakhir terlihat peningkatan sebesar 20,46 persen dan merupakan salah satu daerah pemasok ternak potong ke Kota Jambi. Pengembangan budidaya ternak di wilayah ini cukup prospektif yang di dukung oleh ketersediaan hamparan dan pemasaran yang cukup baik.

Produksi sub sektor perikanan air tawar di wilayah ini meningkat cukup tajam selama 5 tahun terakhir, untuk usaha budidaya kerambah meningkat sekitar 37,89 persen per tahun dan budidaya kolam sekitar 13,72 persen sementara perairan umum cenderung menurun. Dengan potensi yang dimiliki oleh kabupaten ini, maka pengembangan budidaya ikan terutama budidaya ikan kerambah dan

kerambah.....

kerambah jaring apung sangat prospektif karena di dukung oleh fasilitas kredit murah, pasar yang jelas dan kondisi alam serta agroinput.

Dengan adanya pembangunan jaringan jalan selama dua tahun terakhir, maka panjang jalan di Kabupaten Batang Hari sampai tahun 2000 mencapai 830,934 Km yang terdiri dari Jalan Negara 146,39 Km, Jalan Propinsi 36,90 Km dan Jalan Kabupaten sepanjang 647,644 Km. Dari jumlah panjang ruas jalan yang menjadi tanggung jawab kabupaten terdiri dari jalan aspal 172,750 Km (26,673%), jalan pengerasan (kerikil/koral) 180,880 Km (27,928 %), dan jalan tanah sepanjang 294,014 Km (45,399 %). Meskipun panjang jalan yang belum beraspal mencapai 45,399 %, namun relatif belum mengganggu lalu lintas barang dan penumpang. Dalam menunjang kelancaran mobilitas barang, jasa dan penumpang di Kabupaten ini terdapat satu terminal utama yang difungsikan sebagai terminal antar kota. Kedepan pembangunan jaringan transportasi harus memperhatikan outlet Propinsi Jambi, yaitu pelabuhan Muara Sabak sebagai upayaantisipasi lalu lintas perdagangan dengan pusat-pusat produksi.

Di bidang perdagangan luar negeri, aktifitas ekspor dilakukan melalui pelabuhan Jambi. Komoditas utama ekspor Kabupaten Batanghari adalah kayu olahan, karet , hasil hutan ikutan dan hasil perikanan dengan kontribusi sebesar 17,06 persen terhadap pembentukan PDRB. Data terakhir (1999) menunjukkan bahwa volume ekspor Kabupaten ini mencapai 286.971 ton dengan nilai 169.121.804. US \$, karena tidak ada aktivitas impor maka surplus neraca perdagangan adalah sebesar nilai ekspor (169.121.804 US \$).

Untuk menunjang kegiatan perdagangan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di Kabupaten ini terdapat 173 unit koperasi dengan aktivitas melakukan pendistribusian barang dari sentra-sentra produksi ke pusat pemasaran dan sebaliknya. Dengan kinerja koperasi yang relatif baik, sehingga pada akhir tahun 1999

mempunyai.....

mempunyai anggota sebanyak 21.625 orang dengan simpanan mencapai Rp. 7,009 Milyar dengan volume usaha sebesar Rp. 36,395 Milyar. Pada tahun anggaran 2000 lembaga ekonomi ini berperan aktif dalam menyalurkan subsidi BBM kepada masyarakat yang kurang mampu.

Potensi pariwisata di kabupaten ini cukup prospektif, untuk itu perlu penanganan lebih serius dengan mengalokasikan anggaran pembangunan yang lebih besar untuk membangun sarana dan prasarana sehingga dapat menarik para wisatawan domestik maupun manca negara. Pada tahun Anggaran 2000 sub sektor ini mendapat alokasi anggaran sekitar 10 Km, candi di Lubuk Ruso dengan luas 10 Km, candi Pematang Jering dengan luas 5 Km.

Untuk percepatan dan sekaligus pemerataan pembangunan wilayah telah ditetapkan beberapa kawasan fungsional pada RT/ RW seperti kawasan andalan yang ditunjang oleh masing-masing pusat pertumbuhan. Namun kondisi masing-masing kawasan berdasarkan fungsinya masih jauh dari harapan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung baik intra kawasan maupun kota-kota dalam Kabupaten Batang Hari saat ini, terutama antar kota Muara Bulian sebagai hirarki pertama dengan kota lainnya sebagai hirarki kedua yang pada gilirannya menimbulkan beban bagi ibu kota Kabupaten Batanghari.

B. Pendidikan dan Kesehatan

Sebagai daerah pendidikan yang berpusat di Muara Bulian, maka keberadaan kabupaten Batanghari dituntut untuk menjadi pusat pelayanan pendidikan terhadap daerah sekitarnya. Hal ini pada dasarnya telah ditunjang oleh fasilitas pendidikan yang relatif cukup. Pada tahun 1999 di kabupaten ini terdapat 267 sekolah Dasar dengan murid sekitar 20.182 orang. SLTP sebanyak 59 dengan jumlah murid 11.248 orang, SLTA sebanyak 17 Sekolah dengan murid sebanyak 3.108 orang. Untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi di wilayah ini terdapat dua perguruan mempunyai.....

tinggi dengan jumlah Mahasiswa 354 Orang. Jalur pendidikan merupakan salah satu media untuk mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk itu pendidikan dasar 9 tahun harus mendapat perhatian. Jika tahun anggaran 2000 mengalokasikan dana sebesar 13,55 persen dari jumlah anggaran pembangunan dan 98,64 persen diantaranya dialokasikan untuk pendidikan dasar di pandang relatif masih kecil bila kabupaten ini berkonsentrasi pada peningkatan kualitas SDM, untuk idealnya sekitar 25 persen dari jumlah anggaran.

Sub sektor kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu Kabupaten ini di tuntut mampu memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal, dengan melihat fasilitas **kesehatan yang ada yaitu** 1 unit RSU, 12 unit Puskesmas, 83 unit Puskesmas Pembantu, 44 orang Dokter Umum, 3 orang Dokter Spesialis dan 322 orang tenaga bidang medis relatif belum memadai untuk melayani penduduk yang berjumlah sekitar 206.271 jiwa.

C. Penduduk dan Mata Pencaharian

Jumlah penduduk angkatan kerja (yang bekerja dan mencari nafkah) pada tahun 2000 tercatat sebesar 86.185 jiwa, dimana jumlah angkatan kerja yang bekerja berjumlah 80.569 jiwa (93,5%).

Mata pencaharian dominan penduduk di Kabupaten Batanghari bergerak pada sektor primer (pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan penggalian) yaitu sebesar 53.475 jiwa (63,37%), kemudian sisanya bergerak pada sektor tersier (perdagangan, komunikasi, keuangan serta jasa) sebesar **22.260 jiwa dan sektor sekunder** (industri, listrik, air dan konstruksi) sebesar 4.834 jiwa (5,99%).

Sebaliknya jumlah penduduk angkatan kerja yang sedang mencari lapangan pekerjaan adalah sebesar 5.615 jiwa (6,5%) dari jumlah angkatan kerja.

Pada.....

Pada tahun yang sama, jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja berjumlah 81.538 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk yang masih sekolah sebesar 40,9%, mengurus rumah tangga sebesar 50,9% dan yang lainnya sebesar 8,2%.

D. Agama dan Nilai Budaya

Pembangunan di bidang keagamaan diarahkan untuk mewujudkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dan ajaran agama agar tercipta iklim yang kondusif bagi kehidupan sesama umat beragama.

1. Memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog dan aksi bakti sosial umat beragama serta melibatkan secara aktif tokoh agama dalam proses pembangunan.
2. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spritual dan etika dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat serta mengupayakan agar semua peraturan tidak bertentangan dengan agama.
3. Mendorong penyelenggaraan pembinaan pendidikan agama baik secara kualitatif maupun kuantitatif serta peningkatan pelayanan bimbingan umat beragama.
4. Memperlancar dan mempermudah pelayanan dan pengamalan agama serta peningkatan pelayanan ibadah Haji.
5. Meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan ekonomi yang mengarah pada perusakan moral agama serta memfungsikan sumber-sumber pembiayaan melalui BAZIS.
6. Mendorong penyediaan sarana dan prasarana keagamaan secara rasional dengan memperhatikan kepadatan penduduk dan tata ruang.

Masyarakat Batanghari merupakan masyarakat agamais dan hal ini tercermin dari kehidupan sehari-hari sesuai dengan agama yang mereka anut. Kehidupan beragama diterapkan dalam hubungan sosial,

kerukunan.....

kerukunan antar umat beragama, perilaku yang berbudi luhur dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang ada dimasyarakat Batanghari. Hubungan agama dan adat ini keduanya sudah terjalin dalam kehidupan setiap orang dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Terjalannya ajaran agama dan unsur adat diabadikan dalam pepatah :

“Rumah bepagar adat, tepian bepagar baso, negeri bepagar undang” mengandung makna bahwa tatanan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sudah diatur sedekimian rupa, sehingga pelanggaran terhadap hukum dan perundang-undangan yang sudah disepakati bersama merupakan tindakan yang melanggar norma-norma adat.

Pandangan ini melandasi kehidupan masyarakat Batanghari dalam segala aspeknya. Pola pikir, tingkah laku dan tindakan orang Batanghari selalu dilandasi kedua unsur tersebut, agama dan adat.

Pandangan ini diwujudkan dalam sikap, tingkah laku serta perbuatan dan merupakan hal yang sangat penting.

Dalam pengambilan keputusan yang bersifat publik, masyarakat Batanghari selalu melakukannya dengan cara musyawarah serta dilandasi dan dihubungkan dengan toleransi yang tinggi. Sikap menang sendiri dan otoriter sangat dicela dan tidak dapat diterima masyarakat Batang Hari. Musyawarah dan toleransi pada gilirannya melahirkan kesepakatan (mufakat) yang akan dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. Masyarakat Kabupaten Batanghari sering digambarkan sebagai suatu masyarakat yang egalitas artinya mereka memandang bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah sama. Seperti yang diungkapkan oleh pepatah “mintak pado yang ado, betanyo pado yang tau, bekaul pado yang keramat” merupakan perwujudan dan falsafah hidup mereka bahwa pada hakekatnya masing-masing individu masyarakat Batanghari itu sama tanpa kecuali, yaitu sama-sama makhluk Allah. Demikian

c. Hukuman

ungkapan adat mengatakan dalam pepatah tersebut. Pandangan tentang keberadaan manusia yang sama juga diikuti oleh pandangan yang menggambarkan rasa kebersamaan. Hal ini tergambar pula dalam ungkapan tradisional melalui sederetan petuah yang populer yaitu :

“yang buto penumbuk lesung, yang pekak pelepas bedil, yang lumpuh penjago negeri, yang bisu penyimpanan rasio”

“yang tuo menyayangi yang mudo, yang mudo menghargoi yang tuo; gedang idak besebut gelar, kecik idak besebut namo” dan sebagainya yang semuanya mencerminkan prinsip “musyawarah dan toleransi”.

Konsekuensi dari prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, dan prinsip “musyawarah dan toleransi” dalam pengambilan keputusan membutuhkan bentuk kepemimpinan kolektif yang mewakili setiap komponen masyarakat, sehingga keputusan yang diambil benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, dan melibatkan semua unsur dalam masyarakat, “sesuai gendang dengan tari”, yang terdiri dari :

Alim ulama, ninik mamak, cerdik pandai ialah unsur-unsur kepemimpinan yang riil dan benar-benar terdapat dalam masyarakat Batanghari. Pola kepemimpinan dimaksud menjamin terwujudnya keutuhan sosial, kerukunan dan kedamaian yang menjadi landasan keberhasilan.

Sebagai contoh dapat diungkapkan disini kehadiran alim ulama, ninik mamak dan cerdik pandai sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga atau kaum di Kabupaten Batanghari dapat dijadikan sebagai kontrol sosial, karena apabila suatu keluarga mempunyai ninik mamak yang disegani oleh masyarakat, maka anggota keluarga tersebut dalam segala tindak tanduknya juga akan menjadi perhatian masyarakat. Dengan kata lain seorang pemimpin itu harus mencerminkan atau memberikan teladan yang baik bagi masyarakat di sekelilingnya.

E. Perekonomian

Selama tahun 1997 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batanghari tercatat sebesar 4, 23 % dan menurun menjadi minus 5,92 % pada

tahun.....

tahun 1998, namun angka tersebut masih berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Propinsi Jambi yaitu minus 8,85 % (1998). Seiring dengan relatif membaiknya perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi daerah ini pada tahun 1999 telah bisa tumbuh positif 1,74 % dan menjadi 3,11 % pada tahun 2000.

Bila diamati PDRB Kabupaten Batang Hari menurut sektor pada tahun 1999, semua sektor sudah mengalami pertumbuhan positif. Sektor pertanian tumbuh sebesar 2,27%, sektor pertambangan dan pengalihan sebesar 1,28 %, sektor Industri pengolahan 1,44 %, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 1,47 %, sektor bangunan sebesar 1,46 %, sektor perdagangan, hotel dan restoran 0,65 %, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 2,94 %, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 3,01 %, dan sektor jasa-jasa sebesar 2,17 %.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran kemampuan daerah dalam membiayai rumah tangganya, terutama dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dimana perkembangannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Selama dua tahun terakhir PAD Kabupaten Batang Hari menunjukkan peningkatan dari Rp. 000000 Milyar (1999) meningkat menjadi Rp. 5,393 Milyar (2000) atau selama periode terjadi peningkatan rata-rata sebesar 14,08 persen per tahun.

F. Pusat Pertumbuhan

Untuk lebih terpadunya kegiatan pembangunan di Kabupaten Batanghari, kita telah menetapkan pusat pertumbuhan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunan suatu wilayah.

Penetapan wilayah dan pusat pembangunan di dari kepada kesamaan karakteristik potensi, permasalahan dan kerja sama dalam mengisi kekurangan dalam wilayah yang lain. Di tumbuhkannya pusat pembangunan ekonomi wilayah pembangunan kegiatan yang saling terkait antar bidang dan sektor, melalui "Kesatuan Sosial Ekonomi" dan masing-masing wilayah pembangunan, guna dapat merumuskan kebijaksanaan pembangunan yang terpadu dan saling mengisi.

Berdasarkan.....

kepada para Aparatur tersebut sehingga visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan/dicita-citakan.

2. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah ini telah lama di idamkan oleh masyarakat Batanghari, karena masyarakat Batanghari mempunyai jiwa mandiri, kebersamaan dan toleransi dengan adanya otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, merupakan peluang bagi Batanghari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang bertumpu pada keuletan dan kemampuan sendiri (mandiri). Kalau dilihat secara mendalam daerah Batanghari masih di dominasi oleh lapangan usaha yang bergerak di sektor pertanian. Sektor industri pada umumnya merupakan sektor sekunder (penunjang), yang masih berskala kecil, seperti industri kerajinan rumah tangga yang berbasis pertanian hasil hutan.

Pada proses peralihan sistem pemerintahan menuju di terapkanya Otonomi Daerah, maka Pemerintahan Strategis berada pada Kabupaten dan Kota, sedangkan Propinsi merupakan pelaksana otonomi yang terbatas yang diikuti pula proses pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, maka besaran sumber penerimaan daerah mengalami keterbatasan sehingga di perlukan suatu perumusan tentang arah penyelenggaraan pemerintahan yang dituju dan kondisi yang ingin di capai, baik dalam waktu panjang, menengah maupun jangka pendek.

H. Politik dan Keamanan

1. Politik

Sejak bergulirnya era reformasi pada tahun 1998, seperti halnya di daerah lain, maka situasi politik di Batanghari juga mengalami perubahan secara fundamental, dimana proses demokratisasi tumbuh dengan pesat untuk membangun kehidupan

politik.....

politik yang demokratis, stabil namun dinamis dalam masyarakat. Sasarannya adalah untuk menegakkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN dan melaksanakan fungsinya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Pelaksanaan ketentuan pasal 28 UUD 1945, tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dalam kehidupan politik di Batanghari sebagaimana halnya di daerah lain, telah diwujudkan dalam sistem multi partai, pembentukan organisasi kemasyarakatan, interest group, pers yang bebas dan sebagainya. Masalah yang dihadapi, adalah bagaimana piranti demokrasi ini dapat memenuhi fungsinya dalam usaha mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan pendidikan politik yang lebih intensif.

Dari sisi pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari yang terbentuk sebagai hasil Pemilu tahun 1999 dalam membina kehidupan politik yang sehat serta pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif, maka sampai saat ini lembaga tersebut sudah melaksanakan tugas dan fungsinya, baik sebagai penyerap dan penyalur aspirasi rakyat yang mereka wakili maupun sebagai badan legislatif, institusi kontrol dan penganggaran.

2. Keamanan

Meskipun keamanan di Kabupaten Batanghari relatif dalam kondisi yang tidak mengkhawatirkan, tetapi masalah-masalah yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, tidak dapat diabaikan, misalnya : tindak kejahatan perompakan di teritorial perbatasan perairan/laut, pencurian kayu hasil hutan, penyeludupan barang-barang mewah dan masalah tapal batas wilayah.

Selain itu, adanya kecenderungan semakin meluasnya penyakit masyarakat (Pekat) seperti Narkoba, Judi dan Wanita Tuna Susila di tengah masyarakat yang juga dapat memicu timbulnya gangguan keamanan bagi masyarakat, sehingga membuat masyarakat merasa tidak aman berada di daerah/wilayah tinggalnya

sendiri.....

sendiri. Dalam menghadapi masalah-masalah tersebut sangat dibutuhkan sikap responsif dari Pemerintah Kabupaten Batanghari dengan institusi terkait lainnya untuk menangani persoalan yang langsung menyentuh kehidupan dan ketentraman masyarakat.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Memperhatikan kondisi internal Daerah Kabupaten Batanghari dan mengingat perubahan eksternal yang berlangsung sangat cepat akhir-akhir ini, maka dalam penyelenggaraan pemerintah daerah perlu lebih diarahkan pada efisiensi dan efektifitas yang menuntut adanya perubahan budaya kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil, serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai akuntabilitas.

A. VISI

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten berdasarkan kewenangan daerah perlu terarah kepada hasil yang akan dicapai agar terciptanya kebersamaan dan partisipasi melalui perumusan dan masukan, saran, pendapat, aspirasi dan inspirasi dari berbagai pihak hingga tersusunnya rumusan VISI Kabupaten Batanghari.

Rumusan VISI Kabupaten Batanghari mencerminkan apa yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai tujuan jangka panjang kedepan, kemana pemerintah Kabupaten Batanghari akan diarahkan dan apa yang akan dicapai, merupakan VISI.

VISI Pemerintah Kabupaten Batanghari dirumuskan sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN BATANGHARI YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN DENGAN SISTEM EKONOMI KERAKYAKTAN DIDUKUNGAN OLEH PEMERINTAH YANG BAIK DAN SDM YANG BERKUALITAS"

Makna..

Makna pokok yang terkandung dalam VISI diatas adalah;

1. Kabupaten Mandiri menggambarkan kabupaten Batanghari sebagai daerah otonomi yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa potensi sendiri menurut aspirasi masyarakat dengan tetap menjalin kerja sama dengan semua pihak.
2. Sejahtera mengandung arti bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Batanghari dalam bentuk peningkatan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.
3. Berbasis Pertanian dengan sistem ekonomi kerakyatan menggambarkan komitmen pemerintah bersama komponen masyarakat lainnya dalam mengembangkan perekonomian Kabupaten Batanghari yang bertumpu pada potensi daerah.
4. Pemerintah yang baik mengandung arti pemerintahan yang bersih bebas KKN, berwibawa, berkeadilan, profesional dan akuntabel.
5. Sumber Daya Manusia yang berkualitas mengandung arti bahwa sumber daya manusia yang akan dibangun dalam mendukung pelaksanaan pembangunan adalah yang memiliki karakteristik berimtaq, kreatif, inovatif dan sangat responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. MISI

Untuk menjabarkan VISI Kabupaten Batanghari ditetapkan MISI sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Melalui MISI ini akan memberikan arahan jangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan daerah sebagai acuan dan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Untuk maksud tersebut telah dirumuskan 4 (empat) MISI Pemerintah Kabupaten, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan supremasi hukum, aktivitas keagamaan dan adat istiadat.
2. Meningkatkan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan.....

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, ketrampilan dan kesehatan.
4. Meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah.

Makna pokok yang terkandung di dalam MISI :

- 1.a Supremasi hukum adalah menciptakan keadaan masyarakat agar dapat patuh dan taat kepada hukum, sehingga pada gilirannya diharapkan eksistensi hukum itu berwujud dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 1.b Aktivitas Keagamaan adalah suatu kegiatan yang lebih menitikberatkan dorongan kepada masyarakat agar lebih berperan aktif untuk menumbuhkembangkan pada aspek nilai – nilai agama.
- 1.c Adat istiadat adalah sistem nilai yang berlaku ditengah masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai pedoman hidup dan tingkah laku.
- 2.a Kegiatan Ekonomi adalah kegiatan bagi tumbuh dan berkembangnya peluang usaha bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dalam sistem ekonomi kerakyatan.
- 2.b Memanfaatkan sumber daya alam adalah seluruh potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Batanghari yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelolanya.
- 2.c Berwawasan lingkungan adalah pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat harus sesuai dengan daya dukung lingkungan yang ada.
- 3.a Kualitas Pendidikan adalah mutu hasil pendidikan yang diukur dari peserta didik.
- 3.b Kuantitas Pendidikan adalah daya tampung sarana dan prasarana pendidikan terhadap anak usia sekolah yang diukur dari GER (Gross Education Ratio) dan NER (Netto Education Ratio).

3.c Ketrampilan

- 3.c Ketrampilan adalah kegiatan pembelajaran informal terhadap masyarakat dengan profesi tertentu.
- 3.d Kesehatan adalah hasil kinerja pemerintah daerah dibidang kesehatan masyarakat yang diukur dari berbagai variabel indikator derajat kesehatan masyarakat.
- 4.a Partisipasi adalah melibatkan peran serta masyarakat secara utuh dalam proses pembangunan daerah.
- 4.b Pengawasan Masyarakat adalah melibatkan masyarakat secara aktif untuk memberikan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan.
- 4.c Kegiatan Pembangunan adalah kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Faktor – Faktor Kunci Keberhasilan

Pencapaian misi, tujuan dan sasaran sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Ketepatan analisa yang dapat menentukan faktor kunci bagi pencapaian tujuan dan sasaran sangat dibutuhkan dalam perencanaan strategis. Analisa dilakukan dengan pendekatan SWOT (Lampiran I) yang menghasilkan faktor – faktor kunci keberhasilan yang dianalisis akan sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran.

Faktor – faktor kunci keberhasilan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1. Tersedianya SDA yang cukup dan belum digarap secara optimal.
- 2. Adanya peraturan perundang – undangan yang mendukung.
- 3. Adanya kebiasaan kegotongroyongan dalam kehidupan bermasyarakat.
- 4. Adanya jumlah aparatur yang memadai
- 5. Jumlah penduduk cukup memadai
- 6. Adanya komitmen pemerintah pusat terhadap pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan otoda

7. Dukungan

7. Dukungan stabilitas politik dan keamanan yang kondusif
8. Adanya iklim investasi yang mendukung

Perumusan faktor-faktor kunci diatas dilakukan berdasarkan hasil kajian atas lingkungan strategis.

D. Tujuan

1. Terwujudnya masyarakat yang mentaati peraturan dan adat istiadat yang berlaku.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap ajaran agama.
4. Dimanfaatkannya sumber daya alam yang optimal.
5. Meningkatkan akses lapangan usaha oleh pengusaha kecil, menengah dan industri/kerajinan, perdagangan dan aneka jasa yang berorientasi pasar serta meningkatkan daya saing produk daerah dan produktivitas dunia usaha serta sektor lainnya.
6. Meningkatkan potensi dan peranan lembaga keuangan untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat.
7. Meningkatkan kontribusi sektor UKM terhadap pengembangan perekonomian
8. Menyediakan prasarana fisik dan utilitas yang merata sesuai dengan kebutuhan
9. Mengembangkan akses informasi dibidang dunia usaha, pelayanan publik dan sektor lainnya dalam rangka menjangkau minat investor untuk berusaha.
10. Terwujudnya kawasan lingkungan yang lestari.
11. Menciptakan tata ruang yang serasi dan seimbang serta pengelolaan pertanahan yang berkepastian hukum.
12. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.
13. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar.
14. Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
15. Terwujudnya.....

15. Terwujudnya partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam pembangunan

E. Sasaran

1. Menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan adat istiadat oleh masyarakat.
2. Meningkatnya cara penyelesaian sengketa dimasyarakat menggunakan adat istiadat.
3. Mewujudkan ketenangan dan ketentraman dalam masyarakat.
4. Menurunnya tingkat pelanggaran terhadap disiplin dan peraturan kepegawaian.
5. Meningkatnya kualitas aparatur penyelenggara pemerintah.
6. Mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang pelayanan publik.
7. Meningkatnya pengamalan terhadap ajaran agama.
8. Meningkatnya produksi hasil pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.
9. Meningkatnya kemampuan pengelolaan usaha kecil, menengah, industri rumah tangga dan aneka jasa.
10. Meningkatnya peran dan fungsi koperasi serta lembaga keuangan lainnya.
11. Meningkatkan akses permodalan melalui sistem distribusi yang mudah dicapai masyarakat.
12. Meningkatnya produksi dan penerimaan daerah dari UKM.
13. Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana serta utilitas yang memadai.
14. Meningkatnya akses pemasaran bagi produksi usaha masyarakat
15. Meningkatnya jumlah masyarakat luas yang menjadi pelaku usaha produksi/pengolahan, perdagangan dan aneka jasa.
16. Berkembangnya keterkaitan dan kemitraan usaha UKMK dengan pengusaha kecil.
17. Meningkatnya akses terhadap teknologi informasi dan diklat dari setiap UKM.
18. Terciptanya

18. Terciptanya prosedur perajin bagi dunia usaha yang mudah, murah, cepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.
19. Tersedianya dan berkembangnya jaringan informasi dan dokumentasi pembangunan diberbagai bidang secara simetrik bagi seluruh lapisan masyarakat.
20. Meningkatkan kesadaran masyarakat memelihara fungsi dan kualitas sumber daya alam serta terkendalinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.
21. Terpenuhinya fasilitas lingkungan yang serasi (bersih, indah, aman, dan nyaman).
22. Tersusun dan tersosialisasinya rencana tata ruang wilayah dan kawasan tertentu/khusus yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang.
23. Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah tentang tata ruang.
24. Kepastian batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan desa.
25. Jelasnya status hukum kepemilikan tanah.
26. Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan peserta didik yang berkualitas.
27. Bertambahnya jumlah prasarana dan sarana pendidikan.
28. Bertambahnya tenaga-tenaga terampil.
29. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang produktif, berdaya saing dan mandiri dengan tingkat pendidikan yang memadai.
30. Terwujudnya hubungan yang harmonis antar buruh dan perusahaan.
31. Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat
32. Bertambahnya jumlah tenaga medis, paramedis, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat.
33. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.
34. Meningkatnya swadaya masyarakat dalam mengisi pembangunan serta berkurangnya penyalahgunaan dana pembangunan.
35. Berperan dan berfungsinya lembaga masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan serta memanfaatkan hasil pembangunan.

F. Indikator.....

F. indikator Makro

**INDIKATOR MAKRO PENCAPAIAN VISI
KABUPATEN BATANG HARI**

NO.	INDIKATOR MAKRO	T A H U N				
		2001	2002	2003	2004	2005
1	Indeks Pembangunan Manusia					
2	Angka Partisipasi Murni					
3	Indeks Kerukunan Inter dan Antar Umat Beragama (Kualitatif)					
4	Pendapatan per Kapita					
5	Gini Ratio					
6	PDRB					
7	Laju Pertumbuhan Penduduk					
8	Produktivitas Lahan					
9	Prosentase Realisasi Kredit Agribisnis					
10	Meningkatkan Agroindustri					
11	Nilai Ekspor					
12	Prosentase Laju Pertumbuhan Investasi					
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi					
14	Tingkat Pencemaran Udara dan Air					
15	Indeks Pemerataan Pembangunan					

BAB IV

STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM

A. Strategi Kebijakan

1. Pembangunan hukum.
2. Pembangunan adat istiadat dalam masyarakat.
3. Perwujudan kondisi yang kondusif dalam masyarakat.
4. Pembinaan kepegawaian.
5. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah
6. Peningkatan kemampuan perangkat daerah.
7. Peningkatan kinerja pelayanan publik.
8. Mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas keagamaan masyarakat.
9. Peningkatan pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal dengan sistem ekonomi kerakyatan melalui pendekatan Agribisnis dan Agro industri yang berbasis potensi lokal.
10. Menggali potensi sumberdaya pertambangan dan energi secara optimal.
11. Penumbuhan dan pengembangan industri perdagangan dan melalui pemberdayaan potensi perdagangan dan sumber daya secara optimal.
12. Meningkatkan fungsi koperasi sebagai sokoguru perekonomian dimasyarakat.
13. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah.
14. Penjaminan kredit masyarakat dan bantuan permodalan.
15. Meningkatkan keterkaitan usaha dengan sumberdaya domestik.
16. Pemantapan infra dan supra struktur dalam upaya mendorong kegiatan ekonomi.
17. Mengembangkan Sistem Informasi IPTEK, Komunikasi dan media masa pelayanan publik.
18. Mengusahakan pengembangan, pembinaan, pemberdayaan, pemantapan dan penyelamatan hutan.
19. Pengendalian pola-pola pemanfaatan SDA dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
20. Mendorong.....

20. Mendorong pemanfaatan lahan/wilayah kabupaten sesuai dengan potensi dan kegunaannya.
21. Pengembangan Pendidikan.
22. Peningkatan kualitas keterampilan dan tenaga kerja.
23. Membudayakan hidup bersih dan sehat.
24. Peningkatan pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat.
25. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
26. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan.
27. Peningkatan pengawasan masyarakat.

B. Program Kegiatan

1. Memasyarakatkan budaya hukum
 - Menyusun dan menyempurnakan produk hukum daerah
 - Melaksanakan penyuluhan hukum terpadu
 - Peningkatan pelayanan catatan sipil
2. Pembangunan adat istiadat
 - Pembekalan adat istiadat bagi tokoh masyarakat
 - Penyelesaian sengketa menggunakan cara adat istiadat
3. Perlindungan masyarakat
 - Penyediaan dan pelatihan pertahanan sipil
 - Pengendalian kenakalan remaja
 - Pemberantasan peredaran NAPZA
4. Pengawasan
 - Peningkatan Pengawasan kegiatan Pembangunan
 - Penerapan Sanksi dan tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti rugi.
 - Pengendalian proyek dan evaluasi program pembangunan
5. Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah dan pelayanan publik
 - Diklat Struktural.
 - Diklat Teknik Fungsional.
 - Pendidikan Formal.

6. Pembentukan.....

6. Pembentukan dan peningkatan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah
 - Penataan dan penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK)
 - Melaksanakan evaluasi dan kajian organisasi perangkat daerah
 - Meningkatkan pelaksanaan analisis kinerja dan formasi jabatan
 - Membuat tata naskah Dinas sebagai acuan kinerja pemerintah Kabupaten Batanghari
 - Orientasi legislasi bagi anggota DPRD
 - Peningkatan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat serta pemerintah Kabupaten dalam penyaluran aspirasi
 - Penyediaan sarana dan prasarana
 - Pelatihan peningkatan kemampuan bagi anggota Badan Perwakilan Desa
7. Penyediaan prasarana dan sarana penunjang
 - Penyediaan prasarana dan sarana aparatur pemerintah
8. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah
 - Sosialisasi Program Perencanaan Pembangunan, peraturan dan perundang-undangan pelaksanaan pembangunan
 - Penyusunan Lakip
 - Peningkatan Disiplin, dan kinerja aparatur
 - Peningkatan kesejahteraan Aparatur dan Anggota DPRD
 - Standarisasi kualitas SDM anggota DPRD dan kelembagaan masyarakat
9. Pembinaan kehidupan beragama
 - Peningkatan sarana peribadatan, pendidikan agama dan lembaga keagamaan.
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas guru agama dan juru dakwah
 - Penyelenggaraan MTQ, hari besar keagamaan dan ibadah haji.
 - Pemberantasan buta baca al-quran.
 - Peningkatan peran dan fungsi bazis.
 - Peningkatan pendidikan agama di dalam dan di luar sekolah.
 - Pemberian insentif bagi pegawai syara', guru madrasah dan guru ngaji.

10. Peningkatan.....

10. Peningkatan pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal dengan sistem ekonomi kerakyatan melalui pendekatan Agribisnis dan Agroindustri yang berbasis potensi lokal
 - Peningkatan pencapaian swasembaya pangan.
 - Pembinaan, peningkatan dan pengembangan komoditas unggulan.
 - Peningkatan dan pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura .
 - peningkatan dan pengembangan produksi peternakan.
 - Peningkatan dan pengembangan produksi Perikanan
 - Peningkatan dan pengembangan produksi perkebunan
 - Peningkatan difersifikasi pangan dan gizi.
 - Peningkatan manajemen pembangunan pertanian.
 - Peningkatan dan pengembangan teknologi tepat guna/ teknologi spesifik lokasi.
 - peningkatan penyuluhan dan pemberdayaan penyuluh pertanian.
 - Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
11. Pengembangan agribisnis (PA)
 - Perluasan areal tanaman perkebunan
 - peningkatan dan pengembangan usaha / agribisnis pertanian (Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan) dan perkebunan.
 - Pengelolaan dan pemasaran hasil
12. Menumbuhkembangkan pertambangan dan energi
 - Inventarisasi potensi energi dan sumber daya mineral.
 - Mengembangkan dan pembinaan pertambangan rakyat
 - Meningkatkan iklim dan praktek usaha pertambangan yang baik dengan melaksanakan penciptaan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian hukum dan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.
 - Mempercepat pembangunan daerah melalui penerimaan langsung dari sektor energi dan sumber daya mineral.
 - Menyiapkan peraturan daerah dibidang energi dan sumber daya mineral.

10. Peningkatan.....

- Peningkatan SDM dan penguasaan teknologi melalui pemanfaatan pusat diklat dan pusat-pusat litbang Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
13. Menumbuhkembangkan industri
 - Pelatihan dan penyuluhan Motivasi, ketrampilan pelaku industri.
 - Peningkatan Teknologi pelaku usaha industri
 - Penguatan modal pelaku usaha industri
 - Pengembangan jaringan usaha antar pelaku industri
 - Pengembangan jaringan informasi tentang industri
 14. Pengembangan usaha perdagangan dan lembaga-lembaga ekonomi
 - Pemantapan sistim distribusi, komoditi perdagangan.
 - Pembinaan kelembagaan usaha perdagangan.
 - Pembinaan standarisasi mutu komoditi perdagangan.
 - Pengembangan jaringan pasar tradisional dan pasar desa.
 - Pengawasan usaha perdagangan dalam rangka perlindungan konsumen.
 - Penguatan permodalan usaha perdagangan dan koperasi.
 - Penyelenggaraan promosi dan pameran potensi dan produksi daerah.
 15. Kemitraan swasta dan pemerintah
 - Pengembangan informasi dan promosi program-program pemerintah daerah.
 - Penyiapan peraturan kerjasama/kemitraan swasta dan pemerintah daerah.
 16. Pembangunan perkoperasian
 - Pelatihan manajemen perkoperasian.
 - Pembinaan kelembagaan koperasi.
 - Pembinaan dan pengembangan pola kemitraan antar koperasi dengan pelaku usaha lainnya.
 - Pengawasan koperasi.
 17. Peningkatan kemampuan keuangan daerah
 - Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - Intensifikasi pemungutan retribusi dan pajak daerah.

- Penggalian potensi sumber pendapatan daerah.
 - Penyuluhan retribusi dan pajak daerah.
 - Peningkatan penerimaan daerah dari sumber-sumber bagi hasil pendataan potensi retribusi dan pajak daerah.
 - Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak daerah.
18. Penjaminan kredit masyarakat (Avalis)
- Penjamin kredit masyarakat dilembaga keuangan secara selektif oleh Pemerintah Kabupaten.
19. Bantuan Permodalan
- Bantuan penguatan modalan.
20. Kemitraan usaha kecil menengah dengan usaha besar
- Penyelenggaraan forum-forum temu usaha kemitraan UKM dan Pengusaha Besar.
 - Penyelenggaraan diklat UKM dan anggota koperasi.
21. Pengembangan Pariwisata
- Inventarisasi dan pengembangan obyek-obyek wisata
 - Memfasilitasi penyelenggaraan panggung seni dan pekan pesona budaya terpadu dengan pemasaran produk andalan.
22. Peningkatan dan rehabilitasi dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi
- Pelaksanaan pembangunan, peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
 - Pembangunan peningkatan dan rehabilitasi fasilitas transportasi darat dan sungai.
 - Memfasilitasi pembangunan fasilitas telekomunikasi.
23. Peningkatan pembangunan dibidang perumahan dan penyehatan lingkungan
- Pelaksanaan pemugaran perumahan dan lingkungan
 - Pelaksanaan pembangunan jalan setapak dan jalan lingkungan
 - Pelaksanaan pembangunan air bersih
 - Pelaksanaan pembangunan dan penyehatan lingkungan pemukiman
 - Penyediaan prasarana dan sarana kelistrikan.

24. Peningkatan.....

24. Peningkatan pembangunan dibidang irigasi
 - Pelaksanaan pembangunan pintu air (DAM) dan saluran irigasi.
 - Pelaksanaan rehabilitasi pintu air (DAM) dan saluran irigasi.
25. Pelayanan Investasi
 - Menyusun mekanisme pelayanan investor yang cepat dan murah serta berkepastian hukum.
 - Melakukan pelayanan satu atap.
26. Pengembangan jaringan dan sistem informasi
 - Sistim informasi manajemen daerah (Simda).
 - Penyelenggaraan & keikutsertaan promosi pembangunan daerah.
 - Penyediaan data dan Informasi melalui media cetak dan elektronik.
27. Pengembangan IPTEK
 - Pengembangan teknologi tepat guna.
 - Melaksanakan penelitian dan kajian di bidang ekonomi, sosbud dan fispra.
28. Pembinaan dan pengembangan komunikasi dan mediamasa
 - Pembuatan interaktif multimedia.
 - Penerbitan Majalah Media Batang Hari, Berita Bergambar, Kliping dan Buletin.
 - Peningkatan penyiaran Radio Pemerintah Kab. Batanghari (RSPD).
 - Penyelenggaraan perpustakaan.
29. Pengembangan, pembinaan, pemantapan, pemberdayaan dan penyelamatan hutan rakyat, hutan industri dan hutan kota
 - Peningkatan pengembangan dan pembinaan kehutanan.
 - Peningkatan pengembangan usaha kehutanan rakyat.
 - Pembinaan kehutanan dalam kawasan hutan negara.
 - Peningkatan pengamanan dan penyuluhan hutan.
 - Pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur kehutanan.
30. Pelestarian dan pengendalian lingkungan hidup
 - Penghijauan dan reboisasi.
 - Penanganan lahan kritis dan lahan tidur.

- Sosialisasi.....

- Sosialisasi dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
 - Peningkatan pengelolaan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) dan limbah lainnya.
 - Peningkatan gerakan K-3
 - Evaluasi SDA dan lingkungan hidup.
 - Penyusunan Neraca kualitas lingkungan hidup daerah (NKLD).
31. Peningkatan sarana pengelolaan lingkungan hidup
- Pengadaan peralatan pengelolaan lingkungan.
 - Pembangunan sarana pertamanan.
 - Penyediaan prasarana dan sarana kebersihan lingkungan.
32. Pengendalian pencemaran
- Penanggulangan pencemaran air, tanah dan udara.
 - Kajian lingkungan hidup (AMDAL, UKL, UPL).
 - Pemeliharaan hutan lindung.
 - Peningkatan Wasdal LH.
33. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah
- Reklamasi bekas galian Gol – C.
 - Normalisasi sungai.
34. Penyehatan lingkungan
- Rehabilitasi drainase.
 - Penataan lingkungan kumuh.
 - Penataan sarana sanitasi lingkungan.
35. Penataan Tata Ruang
- Revisi RT/RW Kabupaten.
 - Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota.
 - Penyusunan tata ruang kawasan tertentu.
 - Kerjasama perencanaan ruang antar daerah.
36. Pemanfaatan Tata Ruang
- Pelaksanaan catur tertib pertanahan.
37. Pengendalian Tata Ruang
- Sosialisasi tata ruang.
 - Pengendalian perijinan dan pemanfaatan ruang.
 - Penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah.

38. Pengelolaan

38. Pengelolaan Pertanahan
 - Pemanfaatan sistim informasi geografis (GIS) dalam rangka peningkatan pelayanan pertanahan.
 - Inventarisasi status kepemilikan tanah dan batas wilayah.
 - Sertifikasi tanah masyarakat secara massal (Proda).
39. Pembinaan dan pengembangan pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan
 - Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan.
 - Penataan kurikulum sekolah.
 - Pengembangan kegiatan ekstra kurikuler.
 - Penambahan tenaga pengajar dan penjaga sekolah.
 - Peningkatan kualitas pengajar.
 - Pengembangan pendidikan luar sekolah.
 - Penyediaan buku-buku pelajaran, perpustakaan sekolah dan alat peraga/media pendidikan.
 - Pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga.
 - Pengembangan dan pelestarian budaya daerah.
 - Penyelenggaraan perpustakaan.
40. Peningkatan tenaga terampil
 - Pelatihan dan magang.
41. Peningkatan kualitas tenaga kerja
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan kerja.
 - Penyelenggaraan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja daerah.
 - Pengadaan prasarana dan sarana pelatihan.
 - Penetapan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja.
 - Pengembangan sarana hubungan industrial.
 - Sosialisasi peraturan tentang ketenagakerjaan.
42. Promosi kesehatan dan peran serta masyarakat
 - Penyuluhan kesehatan PHBS.
 - Pencegahan dan pemberantasan penyakit.
 - Promosi kesehatan.
 - Pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan.
 - Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
 - Pengembangan sistem informasi dan penelitian kesehatan masyarakat.

43. Pengembangan

43. Pengembangan SDM dan prasarana, sarana dan perbekalan kesehatan.
 - Peningkatan pelayanan kesehatan dasar.
 - Pelayanan rujukan dan rumah sakit.
 - Pengawasan obat, makanan dan minuman.
 - Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
 - Perbaikan gizi dan kesehatan keluarga.
 - Penyehatan lingkungan tempat kerja.
 - Pemantapan sistem legislasi institusi pelayanan, tenaga dan pendidikan kesehatan.
 - Pengembangan sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan.
 - Penyediaan tenaga medis dan para medis.
44. Peningkatan kualitas keluarga
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
 - Meningkatkan ketahanan keluarga.
 - Meningkatkan ekonomi keluarga prasejahtera.
 - Meningkatkan peran institusi masyarakat pedesaan.
 - Meningkatkan sosialisasi advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi).
 - Mengoptimalkan pendataan keluarga.
 - Pembinaan kesejahteraan sosial.
 - Peningkatan kualitas pelayanan, bantuan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah sosial.
 - Penanggulangan bencana alam.
 - Perlindungan masyarakat.
 - Pemberdayaan perempuan.
45. Pemberdayaan masyarakat dalam penguasaan teknologi dan transformasi sosial budaya
 - Pembinaan Kecamatan.
 - Peningkatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan.
 - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
 - Pemberdayaan Wanita Pedesaan.
 - Pelatihan UP2K dan Dasawisma

- Bantuan

- Bantuan pembangunan desa dan Kelurahan
 - Pendayagunaan Posyantekdes.
 - Pengembangan Institusi Desa dan PSM PDP Pedesaan
46. Peningkatan peran kontrol sosial masyarakat dalam pengawasan pembangunan
- Pembukaan kotak pos pengaduan.
 - Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan.
 - Membentuk forum komunikasi lintas pelaku pembangunan daerah.
 - Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.
47. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan
- Peningkatan kualitas Musbangdes (Perencana di Desa/ Kelurahan).
 - Peningkatan kualitas UDKP.
 - Pemantapan pelaksanaan Rakorbang di Tingkat Kabupaten.
48. Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
- Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara swadaya.
 - Penyediaan bantuan guna mendorong keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
 - Memberikan stimulasi pembangunan kepada masyarakat.
 - Pelatihan dan pendampingan pembangunan.

BAB V

PENUTUP

Dengan ditetapkannnya visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dalam perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Batanghari Tahun 2001 – 2005, hal ini merupakan keputusan yang mendasar yang dinyatakan secara garis-garis besar, sebagai acuan operasional kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Batanghari.

Dalam.....

Dalam upaya membangun sistem akuntabilitas dan kinerja, untuk penerapan perencanaan strategis ini diperlukan proses penyusunan konsep dasar pengukuran dan perumusan indikator kinerja.

Akhirnya dikemukakan bahwa, keberhasilan perencanaan strategis ini bukan hanya ditentukan dalam proses penyusunannya, akan tetapi akan banyak dipengaruhi oleh implementasi penerapannya.

Semoga perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Batanghari ini akan dapat memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Batang Hari, bersama dengan seluruh unit kerja, badan, dinas, kantor dan perangkat Kabupaten dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

BUPATI BATANGHARI

dto,

ABDUL FATTAH

MATRIK VISI,

MATRIK VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN PERENCANAAN STRATEGIS
KABUPATEN BATANGHARI

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
TERWUJUDNYA KABUPATEN BATANGHARI YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN DENGAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DIDUKUNG OLEH PEMERINTAH YANG BAIK DAN SDM YANG BERKUALITAS	1. Meningkatkan supremasi hukum, aktivitas keagamaan dan adat istiadat	1. Terwujudnya masyarakat yang menata t i peraturan dan adat istiadat serta ketenangan dan ketentraman d a l i a m masyarakat	1. Menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan adat istiadat oleh masyarakat.
			2. Meningkatkan cara penyelesaian sengketa dimasyarakat menggunakan adat istiadat
			3. Mewujudkan ketenangan dan ketentraman dalam masyarakat
		2. Meningkatkan kinerja jasa pelayanan publik	1. Menurunnya tingkat pelanggaran terhadap disiplin dan peraturan kepegawaian
			2. Meningkatkan kualitas aparatur penyelenggara pemerintahan
			3. Mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik
		3. Meningkatkan ketataan masyarakat terhadap ajaran agama	1. Meningkatkan pengalaman terhadap ajaran agama

2. Meningkatkan.....

1	2	3	4
	<p>2. Meningkatkan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berawasan lingkungan</p>	<p>1. Dimanfaatkannya sumber daya alam yang optimal</p> <p>2. Meningkatkan akses lapangan usaha oleh pengusaha kecil, menengah dan industri/kerajinan, perdagangan dan aneka jasa yang berorientasi pasar serta meningkatkan daya saing produk daerah dan produktivitas dunia usaha serta sektor lainnya</p>	<p>1. Meningkatkan produksi hasil pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan</p> <p>1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha kecil, menengah, industri rumah tangga dan aneka jasa</p>
		<p>3. Meningkatkan potensi dan peranan lembaga keuangan untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat</p>	<p>1. Meningkatkan peran dan fungsi koperasi serta lembaga keuangan lainnya</p> <p>2. Meningkatkan akses permodalan melalui sistem distribusi yang mudah dicapai masyarakat.</p>

4. Meningkatkan.....

1	2	3	4
		4. Meningkatkan kontribusi sektor UKM terhadap pengembangan perekonomian.	1. Meningkatkan produksi dan penerimaan daerah dari UKM.
		5. Menyediakan prasarana fisik dan utilitas yang merata dan sesuai dengan kebutuhan.	1. Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana serta utilitas yang memadai.
		6. Mengembangkan akses informasi dibidang dunia usaha, pelayanan publik dan sektor lainnya. dalam rangka menjangkit minat investor untuk berusaha	1. Terciptanya prosedur perijinan bagi dunia usaha yang mudah, murah, cepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.
			2. Tersedia dan Berkembangnya jaringan informasi dan dokumentasi pembangunan diberbagai bidang secara simetrik bagi seluruh lapisan masyarakat

7. Terwujudnya.....

1	2	3	4
		7. Terwujudnya kawasan lingkungan yang lestari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat memelihara fungsi dan kualitas sumber daya alam serta terkendalinya kerusakan dan pencemaran lingkungan 2. Terpenuhi fasilitas lingkungan yang serasi (bersih Indah, aman, dan nyaman)
		8. Menciptakan tata ruang yang serasi dan seimbang serta pengelolaan pertanahan yang berkepastian hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusun dan tersosialisasinya rencana tata ruang wilayah dan kawasan tertentu/khusus yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang 2. Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah tentang tata ruang 3. Kepastian batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan desa 4. Jelasnya status hukum kepemilikan tanah

3. Meningkatkan....

1	2	3	4
	3. Meningkatkan kualitas kuantitas pendidikan, ketrampilan dan kesehatan	1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan	1. Meningkatkan jumlah tenaga pendidik dan peserta didik yang berkualitas.
		2. Bertambahnya jumlah prasarana dan sarana pendidikan.	2. Bertambahnya jumlah prasarana dan sarana pendidikan.
		1. Bertambahnya tenaga-tenaga terampil.	1. Bertambahnya tenaga-tenaga terampil.
		2. Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang produktif, berdaya saing dan mandiri edngan tingkat pendidikan yang memadai.	2. Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang produktif, berdaya saing dan mandiri edngan tingkat pendidikan yang memadai.
		3. Terwujudnya hubungan yang harmonis antar buruh dan perusahaan.	3. Terwujudnya hubungan yang harmonis antar buruh dan perusahaan.
		1. Terwujudnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masyarakat.	1. Terwujudnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masyarakat.
		2. Bertambahnya jumlah tenaga medis, paramedis, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat.	2. Bertambahnya jumlah tenaga medis, paramedis, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat.
		3. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.	3. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

4. Meningkatkan....

1	2	3	4
	<p>4. Meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah</p>	<p>1. Terwujudnya partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam pembangunan</p>	<p>1. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam mengisi pembangunan serta berkurangnya penyalahgunaan dana pembangunan</p>

MATRIK TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
KABUPATEN BATANGHARI

Misi 1 : Meningkatkan supremasi hukum, aktivitas keagamaan dan adat istiadat.

No	Tujuan	Sasaran	Rencana Strategis Kabupaten Batanghari		
			Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya masyarakat yang menata peraturan dan adat istiadat serta ketenangan dan ketentraman di alam masyarakat.	1. Menurunnya pelanggaran hukum dan adat istiadat oleh masyarakat.	1. Pembangunan hukum dan adat istiadat	1. Memasyarakatkan budaya hukum	1. Menyusun dan menyempurnakan produk hukum daerah 2. Melaksanakan penyuluhan hukum terpadu 3. Peningkatan pelayanan catatan sipil
		2. Meningkatnya penyelesaian sengketa dimasyarakat menggunakan adat istiadat.	1. Pembangunan adat istiadat masyarakat	1. Pembangunan adat istiadat	1. Pembekalan adat istiadat bagi tokoh masyarakat 2. Penyelesaian sengketa menggunakan cara adat istiadat
		3. Mewujudkan ketenangan dan ketentraman di alam masyarakat.	1. Perwujudan kondisi yang kondusif dalam masyarakat	1. Perlindungan masyarakat	1. Penyediaan dan pelatihan pertahanan sipil 2. Pengendalian kenakalan remaja 3. Pemberantasan peredaran NAPZA

2. Meningkatkan.....

1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	1. Menurunnya tingkat pelanggaran terhadap disiplin dan peraturan kepegawaian	1. Pembinaan kepegawaian	1. Pengawasan	1. Peningkatan pengawasan kegiatan pembangunan 2. Penerapan sanksi dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi 3. Pengendalian proyek dan evaluasi program pembangunan.
		2. Meningkatkan kualitas aparatur penyelenggara pemerintahan	1. Peningkatan kualifikasi aparatur pemerintah	1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah dan pelayanan publik	1. Diklat Struktural 2. Diklat Teknik Fungsional 3. Pendidikan Formal 4. Kursus - kursus/ pelatihan
			2. Peningkatan kemampuan perangkat daerah	1. Pembentukan dan peningkatan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah	1. Penataan dan penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK)

2. Melaksanakan.....

1	2	3	4	5	6
					<p>2. Melaksanakan evaluasi dan kajian organisasi perangkat daerah</p> <p>3. Meningkatkan pelaksanaan analisis kinerja dan formasi jabatan</p> <p>4. Membuat tata naskah Dinas sebagai acuan kinerja pemerintah Kabupaten Batang Hari</p> <p>5. Orientasi legislasi bagi anggota DPRD</p> <p>6. Peningkatan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat serta pemerintah Kabupaten dalam penyaluran aspirasi</p> <p>7. Penyediaan sarana dan prasarana</p>

8. Pelatihan....

1	2	3	4	5	6
					8. Pelatihan peningkatan kemampuan bagi anggota Badan Perwakilan Desa.
		3. Mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Peningkatan kinerja pelayanan publik	1. Penyediaan prasarana dan sarana penunjang	1. Penyediaan prasarana dan sarana aparatur pemerintah
				2. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah	1. Sosialisasi Program Perencanaan Pembangunan, peraturan dan perundang-undangan pelaksanaan pembangunan 2. Penyusunan LKIP 3. Peningkatan Disiplin, dan kinerja aparatur 4. Peningkatan kesejahteraan Apratur dan Anggota DPRD

5. Standarisasi,....

1	2	3	4	5	6
					5. Standarisasi kualitas SDM anggota DPRD dan kelembagaan masyarakat
3.	Meningkatkan ketataan masyarakat terhadap ajaran agama	1. Meningkatkan pengamalan terhadap ajaran agama	1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas keagamaan masyarakat	1. Pembinaan kehidupan beragama	1. Peningkatan sarana prasarana, pendidikan agama dan lembaga keagamaan 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas guru agama dan juru dakwah 3. Penyelenggaraan MTQ, hari besar keagamaan dan ibadah haji 4. Pemberantasan buta baca al-quran 5. Peningkatan peran dan fungsi basis

6. Peningkatan.....

1	2	3	4	5	6
					<p>6. Peningkatan pendidikan agama didalam dan diluar sekolah</p> <p>7. Pemberian insentif bagi pegawai syara', guru madrasah dan guru ngaji</p>

MISI 2 :

MISI 2 : Meningkatkan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

No	Tujuan	Sasaran	Rencana Strategis Kabupaten Batanghari		
			Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1.	Dimanfaatkan nya sumber daya alam yang opti- mal	1. Meningkatkan produksi hasil pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan	1. Peningkatan pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal dengan sistem ekonomi kerakyatan melalui pendekatan Agribisnis dan Agro industri yang berbasis potensi lokal	1. Peningkatan ketahanan pangan (PKP) bidang Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan dan Produksi Perkebunan	1. Peningkatan pencapaian swasembada pangan. 2. Peningkatan dan pengembangan komoditas unggulan. 3. Peningkatan dan pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura. 4. Peningkatan dan pengembangan produksi peternakan. 5. Peningkatan dan pengembangan produksi Perikanan 6. Peningkatan dan pengembangan produksi Perkebunan

7. Peningkatan.....

1	2	3	4	5	6
					7. Peningkatan difersifikasi pangan dan gizi. 8. Peningkatan manajemen pembangunan pertanian 9. Peningkatan dan pengembangan teknologi tepat guna/ teknologi spesifik lokasi. 10. Peningkatan penyuluhan dan pemberdayaan penyuluh pertanian 11. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
				2. Pengembangan agribisnis (PA)	1. Perluasan areal t a n a m a n perkebunan 2. Peningkatan dan pengembangan usaha / agribisnis

pertanian

1	2	3	4	5	6
			<p>2. Mengalihkan potensi sumber daya pertanian dan energi secara optimal.</p>	<p>1. Menumbuhkan pertanian dan energi</p>	<p>pertanian (Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan) dan perkebunan.</p> <p>3. Pengelolaan dan pemasaran hasil</p>
				<p>1. Mengembangkan pertanian dan energi</p> <p>2. Mengembangkan pertanian dan energi</p> <p>3. Meningkatkan iklim dan praktek usaha pertanian yang baik dengan melaksanakan penciptaan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian hukum dan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>4. Mempercepat pembangunan.....</p>	

1	2	3	4	5	6
					<p>pembangunan daerah melalui penerimaan langsung dari sektor energi dan sumber daya mineral.</p> <p>5. Menyia pkan peraturan daerah dibidang energi dan sumber daya mineral.</p> <p>6. Peningkatan SDM dan penguasaan teknologi melalui pemanfaatan pusat diklat dan pusat-pusat litbang Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.</p>
2.	<p>Meningkatkan akses lapangan usaha oleh pengusaha kecil,</p>	<p>1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha kecil, menengah, industri rumah</p>	<p>1. Penumbuhan dan pengembangan industri perdagangan melalui</p>	<p>1. Menumbuhkan industri</p>	<p>1. Pelatihan dan penyuluhan Motivasi, ketrampilan pelaku industri.</p> <p>2. Peningkatan</p>

1	2	3	4	5	6
	menengah dan industri/kerajinan, perdagangan dan aneka jasa yang berorientasi pasar serta meningkatkan daya saing produk daerah dan produktivitas dunia usaha serta sektor lainnya	tangga dan aneka jasa	pemberdayaan potensi perdagangan dan sumber daya secara optimal.		<p>Teknologi pelaku usaha industri</p> <p>3. Penguatan modal pelaku usaha industri</p> <p>4. Pengembangan jaringan usaha antar pelaku industri</p> <p>5. Pengembangan jaringan informasi tentang industri</p>
				<p>2. Pengembangan usaha perdagangan dan lembaga - lembaga ekonomi</p>	<p>1. Pemantapan sistem distribusi, komoditi perdagangan.</p> <p>2. P e m b i n a a n kelembagaan usaha perdagangan.</p> <p>3. P e m b i n a a n standarisasi mutu k o m o d i t i perdagangan.</p>

4. Pengembangan

1	2	3	4	5	6
					4. Pengembangan jaringan pasar tradisional dan pasar desa. 5. Pengawasan usaha perdagangan dalam rangka perlindungan konsumen. 6. P e n g u a t a n modalan usaha perdagangan dan koperasi 7. Penyelenggaraan promosi dan pameran potensi dan produksi daerah.
				3. K e m i t r a a n swasta dan pemerintah	1. Pengembangan informasi dan promosi program-program pemerintah daerah 2. Penyiapan peraturan k e r j a s a m a / kemitraan swasta dan pemerintah daerah

3 . Meningkatkan

1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatkan potensi dan peran serta lembaga keuangan untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat	1. Meningkatkan peran dan fungsi koperasi serta lembaga keuangan lainnya	1. Meningkatkan fungsi koperasi sebagai soko guru perekonomian dimasyarakat	1. Pembangunan perkoperasian	1. Pelatihan manajemen perkoperasian. 2. Pembinaan kelembagaan koperasi. 3. Pembinaan dan pengembangan pola kemitraan antar koperasi dengan pelaku usaha lainnya. 4. Pengawasan koperasi
			2. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	2. Peningkatan kemampuan keuangan daerah	1. Penyerahan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 2. Intensifikasi pemanfaatan retribusi dan pajak daerah 3. Penggalan potensi sumber pendapatan daerah

4. Penyuluhan

1	2	3	4	5	6
					4. Penyuluhan retribusi dan pajak daerah 5. Peningkatan penerimaan daerah dari sumber-sumber bagi hasil pendataan potensi retribusi dan pajak daerah" 6. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak daerah
		2. Meningkatkan akses permodalan melalui sistem distribusi yang mudah dicapai kemasyarakat.	1. Penjaminan kredit masyarakat dan bantuan permodalan	1. Penjaminan kredit masyarakat dilembaga keuangan secara selektif oleh Pemerintah Kabupaten	
				2. Bantuan Permodalan	1. Bantuan penguatan permodalan
4.	Meningkatkan kontribusi sektor UKM terhadap pengembangan perekonomian.	1. Meningkatkan produksi dan penerimaan daerah dari UKM.	1. Meningkatkan keterkaitan usaha dengan sumber daya domestik	1. Kemitraan usaha kecil menengah dengan usaha besar	1. Penyelenggaraan forum-forum temu usaha kemitraan UKM dan Pengusaha Besar

2. Penyelenggaraan ...

1	2	3	4	5	6
					2. Penyelenggaraan diklat UKM dan anggota koperasi
				2. Pengembangan Pariwisata	1. Inventarisasi dan pengembangan obyek - obyek wisata 2. Memfasilitasi penyelenggaraan panggung seni dan pekan pesona budaya terpadu dengan pemasaran produk andalan
5.	Menyediakan prasarana fisik dan utilitas yang merata dan sesuai dengan kebutuhan.	1. Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana serta utilitas yang memadai.	1. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur dalam upaya mendorong kegiatan ekonomi.	1. Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana perhubungan dan telekomunikasi 2. Peningkatan dan pembangunan rehabilitasi fasilitas transportasi darat dan sungai.	1. Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan dan jembatan. 2. Pembangunan peningkatan dan rehabilitasi fasilitas transportasi darat dan sungai.

3. Memfasilitasi.....

1	2	3	4	5	6
					3. Memfasilitasi pembangunan fasilitas telekomunikasi
				2. Peningkatan Pembangunan di bidang Perumahan dan kesehatan lingkungan	1. Pelaksanaan Pemugaran perumahan dan lingkungan 2. Pelaksanaan pembangunan jalan setapak dan jalan lingkungan 3. Pelaksanaan pembangunan air bersih 4. Pelaksanaan pembangunan dan penyehatan lingkungan pemukiman 5. Penyediaan prasarana dan sarana kelistrikan
				3. Peningkatan Pembangunan di bidang irigasi	1. Pelaksanaan pembangunan pintu air (DAM) dan

saluran.....

1	2	3	4	5	6
7.	Terwujudnya kawasan lingkungan yang lestari.	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat memelihara fungsi dan kualitas sumber daya alam serta terkendalinya kerusakan dan pencemaran lingkungan	1. Mengusahakan pengembangan pembinaan, pemberdayaan, pemantapan dan penyelamatan hutan.	1. Pengembangan, pembinaan, pemantapan, pemberdayaan dan penyelamatan hutan rakyat, hutan industri dan hutan kota	di bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana
				4. Pembinaan dan pengembangan komunikasi dan media masa	1. Pembuatan interaktif multimedia 2. Penerbitan Majalah Media Batanghari, Berita Bergambar, Kliping dan Buletin 3. Peningkatan penyiaran Radio Pemerintah Kab. Batanghari (RSPD)
				1. Pengembangan, pembinaan, pemantapan, pemberdayaan dan penyelamatan hutan rakyat, hutan industri dan hutan kota	1. Peningkatan pengembangan dan pembinaan Kehutanan. 2. Peningkatan Pengembangan usaha kehutanan Rakyat. 3. Pembangunan kehutanan dalam kawasan hutan negara.

4. Rehabilitasi

1	2	3	4	5	6
					4. Rehabilitasi dan konservasi hutan 5. Peningkatan Pengamanan dan penyuluhan hutan. 6. Pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur Kehutanan.
		2. Terpenuhiya fasilitas lingkungan yang serasi (bersih Indah, aman, dan nyaman)	1. Mengendalikan pola-pola pemanfaatan SDA dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Pelestarian dan pengendalian lingkungan hidup	1. Penghijauan dan Reboisasi 2. Penanganan lahan kritis dan lahan tidur 3. Sosialisasi dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan 4. Peningkatan pengelolaan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) dan limbah lainnya 5. Peningkatan gerakan K-3

6. Evaluasi

1	2	3	4	5	6
					6. Evaluasi SDA dan Lingkungan hidup 7. Penyusunan Neraca kualitas lingkungan hidup daerah (NKLD)
				2. Peningkatan sarana pengelolaan lingkungan hidup	1. Peningkatan peralatan pengelolaan lingkungan 2. Pembangunan sarana pertamanan 3. Penyediaan prasarana dan sarana kebersihan lingkungan
				3. Pengendalian pencemaran	1. Penanggulangan pencemaran air, tanah dan udara 2. Kajian lingkungan hidup (AMDAL, UKL, UPL) 3. Pemeliharaan hutan lindung 4. Peningkatan Wasdal LH

4. Rehabilitasi ...

1	2	3	4	5	6
				4. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah 5. Penyehatan lingkungan	1. Reklamasi bekas galian Gol - C 2. Normalisasi sungai 1. Rehabilitasi drainase 2. Penataan lingkungan kumuh 3. Penataan sarana sanitasi lingkungan
8.	Menciptakan tata ruang yang serasi dan seimbang serta pengelolaan pertanahan yang berkepastian hukum	1. Tersusun dan tersosialisasinya rencana tata ruang wilayah dan kawasan tertentu/khusus yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang 2. Terwujudnya kesadaran masyarakat	1. Mendorong pemanfaatan lahan/wilayah kabupaten sesuai dengan potensi dan kegunaannya.	1. Penataan Tata Ruang 2. Pemanfaatan Tata Ruang 3. Pengendalian Tata Ruang	1. Revisi RT/RW Kabupaten 2. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota 3. Penyusunan tata ruang kawasan tertentu 4. Kerjasama perencanaan ruang antar daerah 1. Pelaksanaan catur tertib pertanahan 1. Sosialisasi tata ruang 2. Pengendalian

perijinan

1	2	3	4	5	6
		<p>terhadap peraturan daerah tentang tata ruang</p> <p>3. Kepastian batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan desa</p> <p>4. Jelasnya status hukum kepemilikan tanah</p>			<p>perijinan dan pemanfaatan ruang</p> <p>3. Pertimbangan penggunaan dan pemanfaatan tanah</p>
				<p>4. Pengelolaan Pertanian</p>	<p>1. Pemanfaatan sistem informasi geografis (GIS) dalam rangka peningkatan pelayanan pertanahan.</p> <p>2. Inventarisasi status pemilikan tanah dan batas wilayah</p> <p>3. Sertifikasi tanah masyarakat secara massal (Proda)</p>

MISI. 3 ...

MISI 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, ketrampilan dan kesehatan

No	Tujuan	Sasaran	Rencana Strategis Kabupaten Batanghari		
			Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan	1. Meningkatkan jumlah tenaga pendidik dan peserta didik yang berkualitas 2. Bertambahnya jumlah prasarana dan sarana pendidikan	1. Pengembangan Pendidikan	1. Pembinaan dan pengembangan pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan	1. Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan 2. Penataan kurikulum sekolah 3. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler 4. Penambahan tenaga pengajar dan penjaga sekolah 5. Peningkatan kualitas pengajar 6. Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah 7. Penyediaan buku-buku pelajaran, perpustakaan sekolah dan alat peraga/media pendidikan
8. Pembinaan					

1	2	3	4	5	6
					8. Pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga 9. Pengembangan dan pelestarian budaya daerah 10. Penyelenggaraan perpustakaan
2.	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar	1. Bertambahnya tenaga-tenaga terampil 2. Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang produktif, berdaya saing dan mandiri dengan tingkat pendidikan yang memadai 3. Terwujudnya hubungan yang harmonis antaraburuh dan perusahaan	1. Peningkatan kualitas keterampilan dan tenaga kerja 2. Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Peningkatan tenaga terampil 2. Peningkatan kualitas tenaga kerja	1. Pelatihan dan magang 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan kerja 2. Penyelenggaraan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja daerah 3. Peningkatan prasarana dan sarana pelatihan 4. Penetapan sistem pengupahan dan jaminan sosial

tenaga ...

1	2	3	4	5	6
					tenaga kerja 5. Pengembangan sarana hubungan industrial 6. Sosialisasi Peraturan tentang ketenagakerjaan
3.	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat	1. Terwujudnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masyarakat	1. Membudayakan hidup bersih dan sehat	1 Promosi kesehatan dan peran serta masyarakat	1. Penyuluhan kesehatan PHBS 2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit. 3. Promosi kesehatan. 4. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan 5. Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat 6. Pengembangan sistem informasi dan penelitian kesehatan masyarakat

2. Bertambahnya ...

1	2	3	4	5	6
		2. Bertambahnya jumlah tenaga medis, paramedis, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat	1. Peningkatan pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat	1. Pengembangan SDM parasarana, dan perbekalan kesehatan.	1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar 2. Pelayanan Rujukan dan Rumah Sakit 3. Pengawasan obat, makanan dan minuman 4. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 5. Perbaikan gizi dan kesehatan keluarga 6. Peningkatan lingkungan tempat kerja 7. Pemantapan sistem legislasi institusi pelayanan, tenaga dan pendidikan kesehatan 8. Pengembangan sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan 9. Penyediaan tenaga medis dan para medis.

3. Meningkatkan ...

1	2	3	4	5	6
		3. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.	1. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat	1. Peningkatan kualitas keluarga	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 2. Meningkatkan ketahanan keluarga 3. Meningkatkan ekonomi keluarga prasejahtera 4. Meningkatkan peran institusi masyarakat pedesaan 5. Meningkatkan sosialisasi advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) 6. Mengoptimalkan pendataan keluarga 7. Pembinaan kesejahteraan sosial 8. Peningkatan kualitas pelayanan, bantuan dan

rehabilitasi ...

1	2	3	4	5	6
					rehabilitasi bagi penyandang masalah sosial 9. Penanggulangan bencana alam 10. Perlindungan masyarakat 11. Pemberdayaan perempuan
				2. Pemberdayaan masyarakat daerah penguasaan teknologi dan transparansi budaya	1. Peningkatan Kecamatan. 2. Peningkatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan. 3. Pemberdayaan Wanita 4. Pelatihan UP2K dan Dasawisma 5. Bantuan pembangunan desa dan Kelurahan 6. Pendayagunaan Posyandekdes. 7. Pengembangan Institusi Desa dan PSM PDP Pedesaan

2. Berperan ...

1	2	3	4	5	6
		2. Berperan dan berfungsinya lembaga masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan serta memanfaatkan hasil pembangunan.	1. Peningkatan pengawasan masyarakat	1. peningkatan peran kontrol sosial masyarakat dalam pengawasan pembangunan	1. Pembukaan kotak pos pengaduan 2. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan 3. Membentuk forum komunikasi lintas pelak u pembangunan daerah 4. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.

MISI 4. ...

MISI 4 : Meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah

No	Tujuan	Sasaran	Rencana Strategis Kabupaten Batanghari		
			Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam pembangunan	1. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam membangun serta berkurangnya penyalahgunaan dana pembangunan	1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan	1. Peningkatan kualitas Musbangdes (Perencana di Desa/Kelurahan) 2. Peningkatan kualitas UDKP 3. Pemantapan pelaksanaan Rakorbang di Tingkat Kabupaten
				2. Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	1. Motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara swadaya 2. Penyediaan bantuan guna mendorong keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 3. Memberikan stimulasi pembangunan kepada masyarakat 4. Pelatihan dan pendampingan pembangunan

MATRIK TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KEBERHASILAN DAN TARGET
PENCAPAIAN SASARAN KABUPATEN BATANGHARI

Misi 1 : Meningkatkan supremasi hukum, aktivitas keagamaan dan adat istiadat.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3
1. Terwujudnya masyarakat yang mentaati peraturan dan adat istiadat	1. Menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan adat istiadat oleh masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya Angka Konflik - Menurunnya Angka Kriminal - Meningkatnya Penyelesaian pelanggaran sesuai dengan hukum - Meningkatnya angka kepemilikan akta-akta catatan sipil.
	2. Meningkatnya cara penyelesaian sengketa dimasyarakat menggunakan adat istiadat.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat istiadat
	3. Mewujudkan ketenangan dan ketentraman dalam masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya partisipasi masyarakat dibidang kamtibmas. - Menurunnya persentase remaja dan pelajar yang terlibat NAPZA
	1. Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin kecilnya tingkat kebocoran anggaran. - Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin aparatur.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik	2. Meningkatnya kualitas aparatur penyelenggara pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya angka pendidikan formal aparatur - Semakin tingginya persentase aparatur yang mengikuti pendidikan struktural - Semakin tingginya persentase aparatur yang mengikuti

T U J U A N	S A S A R A N	I N D I K A T O R
1	2	3
		mengikuti pendidikan teknis/fungsional
	3. Mewujudkan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin optimalnya kinerja pelayanan publik. - Semakin tersedianya sarana dan prasarana penunjang - Tersusunnya standarisasi pelayanan publik - Semakin tingginya pengetahuan masyarakat terhadap standarisasi pelayanan publik.
3. Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap ajaran agama.	1. Meningkatkan pengamalan terhadap ajaran agama.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan angka Muzaki (Pembayaran Zakat) - Ketepatan Penyaluran zakat kepada Mustahik - Meningkatkan kerukunan inter dan antar umat beragama - Menurunnya persentase remaja dan pelajar yang terlibat sex bebas - Semakin menurunnya persentase buta baca Al-qur'an

Misi 2 : Meningkatkan Kegiatan Ekonomi dengan memanfaatkan sumberdaya yang berwawasan lingkungan

1	2	3
1. Dimanfaatkannya sumber daya alam secara optimal	1. Meningkatkan produksi hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan produksi hasil pertanian - Meningkatkan produksi hasil peternakan - Meningkatkan produksi hasil perikanan - Meningkatkan aktivitas penyuluh pertanian - Meningkatkan Nilai tambah sektor pertanian - Meningkatkan luas areal perkebunan - Meningkatkan produksi perkebunan - Meningkatkan nilai tambah sub sektor perkebunan
	2. Tumbuhkan berkembangnya unit-unit usaha dibidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan energi, serta industri dan perdagangan.	- Pertumbuhan unit usaha perbidang usaha
2. Meningkatkan akses lapangan usaha oleh pengusaha kecil, menengah dan industri/kerajinan, perdagangan dan aneka jasa yang	1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha kecil dan menengah, masyarakat, industri rumah tangga dan aneka jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Omzet - Meningkatkan Penghasilan - Meningkatkan Permodalan - Meningkatkan Angka Penjualan - Meningkatkan jumlah tenaga kerja

berorientasi

1	2	3
berorientasi Pasar, serta meningkatnya daya saing produksi daerah dan produktifitas dunia usaha dan sektor lainnya.		
3. Meningkatkan potensi dan peranan lembaga keuangan untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat	<p>1. Meningkatkan peran dan fungsi koperasi serta lembaga keuangan lainnya</p> <p>2. Meningkatkan akses permodalan melalui sistem distribusi yang mudah dicapai masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan jumlah koperasi - Meningkatkan jumlah anggota koperasi - Meningkatkan angka Penyaluran Kredit - Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Meningkatkan Persentase Realisasi Kredit kepada masyarakat
4. Meningkatkan kontribusi sektor UKM terhadap perekonomian	1. Meningkatkan produksi dan penerimaan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan PDRB - Meningkatkan Pendapatan Per kapita
5. Meningkatkan prasarana fisik dan utilitas yang merata dan sesuai dengan kebutuhan.	1. Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana serta utilitas yang memadai.	<p>Meningkatnya Jumlah sarana dan prasarana layanan publik/masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportasi - Kelistrikan - Telekomunikasi

- Irigasi.....

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> - Irigasi - Air bersih - Pasar - Drainase <p>Meningkatnya persentase kondisi yang buruk dan sedang serta meningkatnya kondisi baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportasi - Kelistrikan - Telekomunikasi - Irigasi - Air bersih - Pasar - Drainase
6. Mengembangkan akses informasi dibidang dunia usaha, pelayanan publik dan sektor lainnya	1. Terciptanya prosedur perijinan bagi dunia usaha yang mudah, murah, cepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin tingginya Percepatan pelayanan terhadap investor - Semakin murah nya Tarif
	2. Tersedia dan berkembangnya jaringan informasi dan dokumentasi pembangunan diberbagai bidang secara simetrik bagi seluruh lapisan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya rasio Penggunaan telepon terhadap jumlah penduduk - Meningkatnya rasio konsumsi media cetak terhadap jumlah penduduk - Meningkatnya angka kunjungan ke perpustakaan - Tersedianya Data base tentang Batanghari - Adanya fasilitas Website/Home Page

7. Terwujudnya.....

1	2	3
7. Terwujudnya kawasan lingkungan yang lestari.	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat memelihara fungsi dan kualitas sumber daya alam, serta Terkendalnya kerusakan dan pencemaran lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin tingginya Tingkat partisipasi masyarakat dalam penghijauan - Semakin menurunnya Luas kerusakan lahan - Semakin rendahnya Tingkat pencemaran air - Semakin banyaknya Jumlah tempat penampungan sampah dan sarana pendukungnya
	2. Terpenuhiya fasilitas lingkungan yang serasi bersih (Indah, aman, dan nyaman)	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin tingginya tingkat pengamanan/ pengendalian garis sempadan sungai - Semakin banyaknya Luas ruang terbuka hijau - Semakin lengkapnya penyediaan sarana persampahan
8. Menciptakan tata ruang yang serasi dan seimbang serta pengelolaan pertanahan yang berkepastian hukum	1. Tersusunnya tata ruang yang serasi dan seimbang serta pengelolaan pertanahan yang berkepastian hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) - Terkedalnya Kesesuaian antara perencanaan tata ruang dengan pemanfaatan di lapangan - Tersediannya rencana tata ruang wilayah - Tersediannya rencana tata ruang kawasan - Meningkatnya persepsi dan pengetahuan masyarakat tentang tata ruang - Semakin banyaknya kecamatan yang memperoleh informasi rencana tata ruang

2. Terwujudnya

2. Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah tentang tata ruang	<ul style="list-style-type: none">- Semakin rendahnya angka penyimpangan dari rencana tata ruang	
3. Kepastian batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan desa	<ul style="list-style-type: none">- Bertambahnya Jumlah batas Desa yang terukur- Bertambahnya Batas Kecamatan yang terukur- Bertambahnya Batas Kabupaten yang disepakati	
4. Jelasnya status hukum kepemilikan tanah	<ul style="list-style-type: none">- Semakin banyaknya Bidang tanah yang bersertifikat- Semakin luasnya tanah yang bersertifikat	

MISI 3 :

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan, Keterampilan dan Kesehatan

1	2	3
1. Terwujudnya Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.	1. Meningkatkan jumlah tenaga pendidik dan peserta didik yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Angka Partisipasi kasar - Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) - Meningkatkan Komposisi penduduk yang tamat SLTP ke atas - Meningkatkan Rasio jumlah murid dengan tenaga pengajar - Persentase jenjang pendidikan para tenaga pengajar
	2. Bertambahnya jumlah prasarana dan sarana pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Jumlah terbangun unit gedung baru (UGB) dan PKB serta rehabilitasi sekolah - Meningkatkan ratio jumlah murid dan ruangan kelas. - Meningkatkan Angka kunjungan ke perpustakaan
2. Terwujudnya Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar.	1. Bertambahnya tenaga-tenaga terampil.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kompetensi remaja terdidik keterampilan luar sekolah (PLS) - Meningkatkan Rasio lembaga pendidikan keterampilan terhadap jumlah penduduk usia kerja

2. Meningkatnya.....

1	2	3
	<p>2. Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang produktif, berdayasaing dan mandiri dengan tingkat pendidikan yang memadai.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Angka Penyerapan tenaga kerja - Meningkatkan Angka perluasan kesempatan kerja baru - Meningkatkan Jumlah frekuensi pelatihan - Meningkatkan Jumlah tenaga kerja yang dilatih - Menurunnya Angka keluar masuk tenaga kerja (turn over) dalam hubungan kerja
	<p>3. Terwujudnya hubungan yang harmonis antara buruh dan perusahaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya Angka pemogokan pekerja - Menurunnya Angka pelanggaran ketenagakerjaan - Meningkatkan penerimaan upah tenaga kerja - Menurunnya angka pemogokan - Menurunnya kasus unjuk rasa - Menurunnya Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (AKB)
<p>3. Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial</p>	<p>1. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya Angka Kematian balita per 1000 balita (AKABA) - Menurunnya Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (AKI) - Meningkatkan Angka harapan hidup - Menurunnya kasus Balita gizi buruk - Menurunnya kasus Balita gizi kurang - Meningkatkan Perilaku hidup bersih dan sehat

2. Bertambahnya...

1	2	3
	2. Bertambahnya jumlah tenaga medis, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pelayanan kesehatan terhadap angka tingkat penduduk miskin - Eliminasi kejadian luar biasa - Meningkatkan Jumlah dokter per 1000 penduduk - Meningkatkan Jumlah para medis per 1000 penduduk - Meningkatkan Jumlah bidan per 1000 penduduk - Meningkatkan Jumlah puskesmas - Meningkatkan Jumlah puskesmas
	3. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kepesertaan JPKM - Meningkatkan Jumlah desa sehat - Menurunnya Angka pakir miskin - Semakin tingginya tingkat kecepatan dan ketepatan penanganan bidang bencana, sosial dan kekerasan - Meningkatkan jumlah keterlibatan perempuan dalam pemerintahan

Misi 4 : Meningkatkan Partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah

1	2	3
1. Terwujudnya partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam pembangunan	1. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam mengisi pembangunan serta berkurangnya penyalahgunaan dana pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan - Meningkatkan swadaya murni masyarakat dalam pembangunan. - Semakin rendahnya Jumlah kerugian negara (Daerah)
	2. Berperan dan berfungsinya lembaga masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan serta memanfaatkan hasil pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin banyaknya lembaga masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan. - Semakin tingginya Tingkat kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan (jumlah surat pengaduan)